PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Bab I
Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan *Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.* disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

(a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

(b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

(c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.

(g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)

(i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator pencapian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah daerah
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

Bab IV Kebijakan akuntansi
- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.1.1. Pendapatan - Laporan Realisasi Anggaran

5.1.2. Belanja

5.1.3. Transfer

5.1.4. Pembiayaan

5.1.5. Pendapatan – LO

5.1.6. Beban

5.1.7. Aset

5.1.8. Kewajiban

5.1.9. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah.

Bab VII Penutup

Bab II
Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan daerah Bali serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2022 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
2. Peningkatan profesionalisme manajemen dan akses pelayanan yang bermutu dari segi kualitas dan kuantitas
3. Peningkatan kualitas lingkungan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesehatan

Arah Kebijakan :

1. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari program pembangunan manusia
2. Pengelolaan dan pelaksanaan program dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
4. Dukungan sumber daya bersumber dari potensi daerah termasuk masyarakat dan bantuan yang tidak mengikat
5. Program Kabupaten Sehat adalah salah satu rujukan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat kabupaten yang dikembangkan
6. Desa Siaga merupakan wadah pengembangan program lintas sektor bidang kesehatan di tingkat desa.

Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2022.

NO	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan Rp	REALISASI Rp	%
1.	**PENDAPATAN**	**18.807.921.271,00**	**13.987.954.987,51**	**74,37**
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	18.807.921.271,00	13.987.954.987,51	74,37
	- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	18.807.921.271,00	13.987.954.987,51	74,37
2.	**BELANJA**	**342.227.480.940,00**	**316.965.230.938,00**	**92,62**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(323.419.559.669,00)**	**(302.977.275.950,49)**	**93,68**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.	Penggunaan SILPA		1.797.688.692,95	
	SILPA	**(323.419.559.669,00)**	**(301.179.587.257,54)**	**93,12**

Pada bagian pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) –Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah - LRA. Pendapatan Asli Daerah - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA terdiri dari :

1. Penerimaan Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
2. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
3. Pendapatan BLUD
4. Hasil

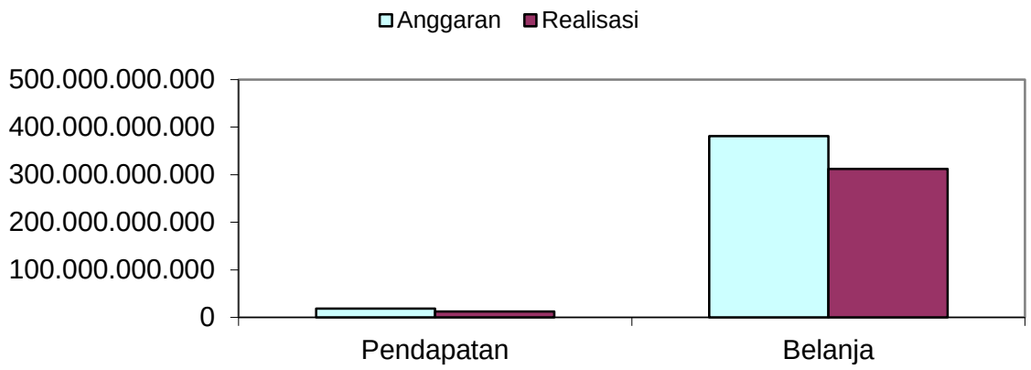

Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu Rp.13.987.954.987,51 atau 74,37 % dari target yang dianggarkan yaitu Rp. 18.807.921.271,-. Sementara itu dari sisi belanja, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.342.227.480.940,- terealisasi sebesar Rp 316.965.230.938,- atau 92,62 %.

Capaian bagian belanja sebesar 92,62 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, target anggaran sebesar *Rp. 337.510.793.295,-* terealisasi sebesar *Rp. 313.727.791.783,-* atau 92,95 *%.*
- Belanja Modal, target anggaran sebesar *Rp.4.716.687.645-* terealisasi sebesar *Rp.3.237.439.155,-* atau 68,64 *%.*

Realisasi anggaran belanja Operasi sebesar *Rp. 313.727.791.783,-* di atas digunakan untuk membiayai pelaksananaan program-program di lingkungan Dinas Kesehatan.

3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja yang realisasinya dibawah 75%

Dalam merealisasi target pendapatan tidak ditemui hambatan yang bersifat prinsip.

Untuk belanja dalam merealisasikannya ada beberapa Kegiatan belanja program yang realisasi dibawah 75% dan belanja modal pada Tahun 2022 yang tidak bisa dilaksanakan. Berikut akan diuraikan Kegiatan Belanja Program dan Kegiatan Belanja Modal yang tidak dapat dilaksanakan pada Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 , beserta apa yang menyebabkan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan dari Dinas kesehatan berasal dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah yang berasal Jasa Layanan Kesehatan, Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

Angaran Pendapatan BLUD Dinas KesehatanTahun 2022 Senilai Rp.18.807.921.271,00 dan terealisasi senilai Rp.13.939.111.746,60 sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.12.621.497.313,07.

1. Perbedaan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp. 18.807.921.271,00 dan Realisasi Tahun 2022 Rp.13.939.111.746,60 sebesar Rp.4.868.809.524,40
2. Perbedaan Realisasi Antara Pendapatan BLUD Tahun 2021 Rp. 12.621.497.313,07 dengan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp.13.939.111.746,60 sebesar Rp.1.317.614.433,53. Besar kecilnya Pendapatan BLUD disesuaikan dengan jumlah pasien yang terdaftar di Fasilitas kesehatan dan tingkat kunjungan pasien.
3. Pendapatan BLUD bersumber dari Pendapatan Kapitasi JKN dan Jasa Layanan Puskesmas.
    - Dasar Hukum Pendapatan Kapitasi JKN yaitu Keputusan Bupati Badung Nomor 1965/0413/HK/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD Puskesmas se Kabupaten Badung.
    - Dasar Hukum Jasa Layanan Puskesmas yaitu Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat

B. BELANJA

Belanja Operasi

Berikut diuraikan Kegiatan Belanja Program dan kegiatan Belanja Modal yang realisasinya dibawah 75 % :

a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.2.01.7) realisasinya sebesar 40,80 % disebabkan karena SPD (Balanja cetak) tidak disetujui BPKAD.
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1.2.06.4) realisasinya sebesar 53,38 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.2.09.1) realisasinya sebesar 57,80 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.2.09.6) realisasinya sebesar 30,60 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1.2.09.9) realisasinya sebesar 72,08 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
f. Pengadaan Obat dan Vaksin (02.02.01.16) realisasinya sebesar 72,94 % disebabkan harga obat pada SIPD lebih besar dibandingkan dengan harga obat pada e-catalog.
g. Pengadaan Bahan Pakai Habis (02.02.01.17) realisasinya sebesar 73,07 % disebabkan karena harga Bahan Habis Pakai pada SIPD lebih besar dibandingkan dengan harga pada E-Catalog.
h. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (02.02.01.19) realisasinya sebesar 63,04 % disebabkan Perubahan Sistem Pengadaan dari Swakelola ke Pengadaan Langsung sehingga dari bulan April sampai dengan bulan Juni tidak bisa dilaksanakan.
i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (02.02.02.2) realisasinya sebesar 55,11 % dikarenakan pelaksanaan kegiatan jampersal meliputi sewa rumah tunggu kelahiran, belanja transport rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta belanja transport pemantuan pasien dirumah tunggu kelahiran berdasarkan kasus ibu hamil, ibu nifas, maunpun bayi baru lahir baik yang normal maupun resiko tinggi, serta jarak RSD mangusada dengan rumah pasien, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran lebih besar pada pasien yang memiliki jarak rumah cukup jauh dari RSD mangusada
j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (02.02.02.3) realisasinya sebesar 60,07 % dikarenakan pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital belum dapat terlaksana dari awal tahun meliputi biaya pengiriman sampel melalui jasa pengiriman, dan belanja transport lokal petugas dari fasyankes ke jasa pengiriman karena pembiayaan laboratorium pemeriksaan SHK belum terdapat anggaran di kementerian kesehatan dan BPJS, pembiayaan SHK baru dilaksanakan sesuai SE Nomor HK.02.02/B/628/2022 tentang pelaksanaan skring hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir tahun anggaran 2022 tgl 24 agustus 2022 dimana pelaksanaan SHK dilaksanaan bulan september 2022 dan Bahan Habis Pakai yang dikirimkan oleh RS. Dr

Sardjito sampai pada akhir bulan september. pelaksanaan pengambilan SHK baru dapat dilaksanakan di kabupaten Badung bulan oktober sampai tgl 10 desember 2022.

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (02.02.02.5) realisasinya sebesar 71,43 % dikarenakan beberapa puskesmas tidak melakukan pengamprahan terhadap beberapa belanja yang sudah diajukan sebelumnya pada RKA. Untuk.

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (02.02.02.5) realisasinya sebesar 74,26 % dikarenakan beberapa puskesmas tidak melakukan pengamprahan terhadap beberapa belanja yang sudah diajukan sebelumnya pada RKA. Penyerapan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi di Dinas Kesehatan sudah terlaksana 100%

m. . Pengelolaan Pelayan Kesehatan Lingkungan (02.02.02.17) realisasinya sebesar 69,96 % karena pada sub keg ini melibatkan 13 Puskesmas yang tidak terealisasi karena keterbatasan waktu, yang pada awal tahun s/d Juni masih kegiatan vaksinasi.

n. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (02.02.02.18) realisasinya sebesar 43,61 % dikarenakan beberapa puskesmas tidak melakukan pengamprahan terhadap beberapa belanja yang sudah diajukan sebelumnya pada RKA. Penyerapan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi di Dinas Kesehatan sudah terlaksana 100%

o. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (02.02.02.20) realisasinya sebesar 20,86 % dikarenakan Surveilans bencana tidak bisa teramprah karena tidak ada situasi bencana, Surveilans AFP ditemukannya di RS (tidak tertangkap di puskesmas), Surveilans Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan analisis PE tidak maksimal teramprah karena kegiatannya sudah include dalam kegiatan SKDR,

p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPSA (02.02.02.22) realisasinya sebesar 54,87 % dikarenakan Perjalanan Dinas Dalam Kota (Rujukan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa) ke RSJ Provinsi Bali bersifat insidentil

q. Pengambilan sample dan pengiriman sample spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (02.02.02.28) realisasinya sebesar 33,77 % dikarenakan Tahun 2022 tidak ada KLB PD3I sehingga sebagian besar kasus PD3I yang ditemukan ada di rumah sakit (tidak puskesmas) sehingga kabupaten yang mengambil sampelnya, puskesmas tidak mengambil sample.

r. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (02.02.02.29) realisasinya sebesar 58,28 % dikarenakan Keterlambatan penerbitan SPD (belanja alat tulis kantor dan Bahan Bakar

Minyak) sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal sesuai rencana anggaran kas.

s. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (02.02.02.35) realisasinya sebesar 0,68 % dikarenakan Pelaksanaan survei reakreditasi blm bisa terlaksanan dikarenakan blm turunnya regulasi yang pasti dari kemenkes.
t. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (02.02.02.36) realisasinya sebesar 8,33 % dikarenakan Hanya ada 1 Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius di tahun 2022
u. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (02.02.04.3) realisasinya sebesar 73,10 % dikarenakan survei tdk terlaksana karna blm ada turun regulasi yang terbaru maka pendampingan blm maksimal terlaksana.
v. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar (03.02.02.2) realisasinya sebesar 70,92 % dikarenakan Gaji Tenaga BOK Sebanyak 18 orang dibayarkan mulai bulan mei 2022 sesuai hasil seleksi dan SK Bupati Badung
w. Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar serta Tidnak Lanjut Pengawasan (05.02.06.1) realisasinya sebesar 68,92 % dikarenakan Pengawasan Iklan tdk bisa dicairkan karena sarana Industri Rumah Tangga

Pangan (PIRT) di Kab. Badung belum ada yang mengiklankan produknya , dan pada kegiatan pembelian sampel dan biaya pengujian sampel mendapat penawaran dibawah pagu.

Bab IV
Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas**
  Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**
  Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

I.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.4. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

I.5. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.6. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari Hasil pemeriksaan APFP.

I.9. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.10. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

II.1.Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

II.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

II.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

II.7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sudah diberlakukan.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

III.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

III.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

IV.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

IV.2. Uang Muka Kas Daerah

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

IV.3. Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

IV.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

V.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

V.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.

Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN – LRA

Jumlah Pendapatan-LRA Dinas Kesehatan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 18.807.921.271,00 terealisasi sebesar Rp. 13.987.954.987,51. atau 74,37 %, sedangkan realisasi pendapatan-LRA tahun 2021 sebesar Rp. 12.675.153.358,96

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan-LRA Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	18.807.921.271,00	13.987.954.987,51	74,37	12.675.153.358,96
Jumlah		**18.807.921.271,00**	**13.987.954.987,51**	**74,37**	**12.675.153.358,96**

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-LRA, target anggaran setelah perubahan 2022 sebesar Rp. 18.807.921.271,00 terealisasi sebesar Rp. 13.987.954.987,51 atau 74,37 %, sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp. 12.675.153.358,96. Rincian atas Realisasi PAD-LRA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Daerah	-	-	-	-
2	Lain-lain PAD Yang Sah	18.807.921.271,00	13.987.954.987,51	74,37	12.675.153.358,96
Jumlah		**18.807.921.271,00**	**13.987.954.987,51**	**74,37**	**12.675.153.358,96**

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD secara terperinci adalah sebagai berikut:

a.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 0,00 atau 0%, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

a.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 18.807.921.271,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 13.987.954.987,51 atau 74,37%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 12.675.153.358,96

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.6 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Tahun 2022 dan 2021

PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro		14.437.452,91		17.507.595,63
3	Pendapatan dari Pengembalian		-		-
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		34.395.788,00		29.469.239,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK				6.679.211,26
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-		-
7	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN		-		-
9	Pendapatan BLUD	18.807.921.271,00	13.939.121.746,60	**74,11**	12.621.497.313,07
10	Penerimaan lainnya - LRA		-		-
Jumlah		**18.807.921.271,00**	**13.987.954.987,51**	**74,37**	**12.675.153.358,96**

Lain- lain Pendapatan Asli Daerah senilai Rp. 13.987.954.987,51 berasal dari :

a. Penerimaan Jasa giro pada Kas di Bendahara senilai Rp. 14.437.452,91.
b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 34.395.788,00
c. Pendapatan BLUD senilai Rp. 13.939.121.746,60 , pendapatan BLUD berasal dari penerimaan Dana Kapitasi JKN, dan Jasa Layanan Puskesmas

5.1.2. BELANJA

Belanja dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jembatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Bagi Hasil - Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Untuk Dinas kesehatan hanya terdapat 2 (dua) kelompok Belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 342.227.480.940,00 realisasinya sebesar Rp. 316.965.230.938,00 atau 92,62%, sedangkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 312.472.682.404,00

Dari Realisasi Belanja Tahun 2022 senilai Rp. 316.965.230.938,00, terdapat selisih dengan total Realisasi SP2D GU , GU Nihil, LS, dan SP2B BLUD Tahun 2022 senilai Rp. 21.823.802,00

yang merupakan Pengurangan Belanja (CP) yang terdiri dari :

a. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Denda atas keterlambatan pekerjaan Belanja Vaksin VAR kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak Menular senilai Rp**. 3.017.925,00**

b. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Belanja ATK Resiko Terinfeksi HIV senilari Rp**. 33,00**

c. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Kelebihan Pengembalian Jasa Tenaga AHli Sib. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehata Rp. **300.000,00**

d. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian denda atas keterlambatan Belanja Obat-Obatan pada Sub Kegiatan Pengadaan Oba Rp**. 84.857,00**

e. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian denda atas keterlambatan Belanja Obat-Obatan pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat dengan surat pemesanan no 20/PPK.FARMASI/DISKES/2022 Rp. **31.299,00**

f. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Kelebihan Pembayaran Transport Lokal deteksi kasus HIV Puskesmas Petang I SP2D/06400/III/DISKES/2022 Rp**. 720.000,00**

g. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian denda atas keterlambatan Belanja Obat-Obatan pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat dengan surat pesanan no 117/PPK.FARMASI/DIKES/2022 Rp. **3.373.593,00**

h. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Gaji Bulan Oktober 2022 a.n Ni Wayan Lahariani,SST Puskesmas Mengwi I Rp. **6.494.305,00**

i. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian denda atas keterlambatan Belanja Obat-Obatan (PT Indofarma Global Medika Denpasar) Rp. **1.522.430,00**

j. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian denda atas keterlambatan Belanja Persediaan Dalam Proses,Pengadaan Bahan Habis Pakai (PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Denpasar) Rp. **39.360,00**

k. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Kelebihan Transfer Belanja Transport :okal di UPTD Puskesmas Kuta Selatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita Sp2D Ni. 12405 Rp. **440.000,00**

l. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Kelebihan Transfer Honorarium Penyuluhan Pendampingan Pengelola Data Puskesmas Abs II Sp2D No.07302/IX/DISKES/2022 Rp**. 1.000.000,00**

m. Penyesuaian pengurangan belanja (Contra Pos/CP) yang berupa Pengembalian Belanja Transport Petugas Pusk M III SP2D 04973/VII/DISKES/2022 Rp.700.000,- Pengembalian Belanja transport petugas M III Epidemlogi SP2D 04033/VI/DISKES/2022 Rp.1.500.000,- Pengembalian Belanja honor penyuluh SP2D 07302 Rp.2.600.000,- senlai Total Rp**. 4.800.000,00**

Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	337.510.793.295,00	313.727.791.783,00	92,95	310.464.199.764,00
2	Belanja Modal	4.716.687.645,00	3.237.439.155,00	68,64	2.008.482.640,00
Jumlah		**342.227.480.940,00**	**316.965.230.938,00**	**92,62**	**312.472.682.404,00**

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Gambaran angka realisasi Belanja secara terperinci adalah sebagai berikut:

Target anggaran setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 337.510.793.295,00 realisasi sebesar Rp. 313.727.791.783,00 atau 92,95%, sedangkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 310.464.199.764,00.

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.8 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	117.594.645.053,00	112.113.258.373,00	95,34	106.256.967.178,00
2	Belanja Barang	219.916.148.242,00	201.614.533.410,00	91,68	204.207.232.586,00
3	Belanja Hibah	-	-		-
Jumlah		**337.510.793.295,00**	**313.727.791.783,00**	**92,95**	**310.464.199.764,00**

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN , dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021. Belanja Pegawai dengan target anggaran sebesar Rp.117.594.645.053,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.112.113.258.373,00 atau 95,34 %, sedangkan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.106.256.967.178,00 . Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	52.392.317.877,00	49.267.493.637,00	94,04	49.792.047.207,00
2	Tambahan penghasilan ASN	65.202.327.176,00	62.845.764.736,00	96,39	52.139.562.182,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00		4.325.357.789
	J u m l a h	**117.594.645.053,00**	**112.113.258.373,00**	**95,34**	**106.256.967.178,00**

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas.

Tabel 5.10 Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		Rp	Rp		Rp
	Belanja Barang & Jasa				
1	Belanja bahan Pakai Habis Kantor	18.439.723.647,00	13.476.979.064,00	73,09	11.982.411.738,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.260.000,00	0,00		
3	Belanja Jasa Kantor	62.608.345.963,00	58.959.099.774,00	94,17	64.749.321.438,00
4	Belanja Premi Asuransi	111.719.476.286,00	108.771.394.011,00	97,36	103.082.134.834,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	49.200.000,00	0,00		
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung	229.600.000,00	93.400.000,00	40,68	7.956.612.500,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.000.000,00	17.557.980,00	97,54	
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1796.473.000,00	1.042.701.278,00	58,04	
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	675.556.450,00	486.951.362,00	72,08	

10	Belanja Perjalanan dinas	7.413.370.000,00	5.022.015.000,00	67,74	3.691.386.200,00
11	Belanja pemeliharaan				528.877.336,00
12	Belanja Uang atau jasa untu diberikan kepada Pihak Ketiga	1.133.450.000,00	651.018.000,00	57,44	655.260.400,00
13	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.831.692.896,00	13.093.416.941,00	82,70	11.561.228.140,00
Jumlah		**219.916.148.24200**	**201.614.533.410,00**	**91,68**	**204.207.232.586,00**

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 tidak terdapat belanja hibah.

Tabel 5.11 Belanja Hibah

	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	Belanja hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah		***0,00***	***0,00***	**0**	***52.859.583.002,53***

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 berupa pengadaan Peralatan dan Mesin dan Bangunan Gedung. Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.4.716.687.645*,00 realisasi belanja sebesar *Rp.3.237.439.155,00* atau 68,64%. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal secara keseluruhan, dengan rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
	Belanja Modal				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.620.737.645,00.	3.187.876.978,00	68,99	2.008.482.640,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.450.000,00	49.562.177,00	59.39	
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.500.000,00		0,00	
Jumlah		**4.716.687.645,00**	**3.237.439.155,00**	**68,64**	**2.008.482.640,00**

Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021 secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	**Belanja Modal** Belanja Modal Alat Bantu	495.000.000,00	410.000.000,00	82,83	
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.038.783.827,00	674.525.998,00	64,93	744.889.577,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	28.379.504,00	0,00		34.540.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				

5	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.224.828.899,00	1.598.864.743,00	71,86	896.648.388,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	814.171.861	504.486.237,00	61,96	329.502.135,00
7	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboraturium	19.573.554,00	0,00		2.902.540,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung	83.450.000,00	49.562.177,00	59,39	
9	Belanja Modal Jaringan	12.500.000,00			
J u m l a h		**4.716.687.645,00**	**3.237.439.155,00**	**68,64**	**2.008.482.640,00**

2.1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan target anggaran sebesar *Rp.4.620.737.645,00* realisasi belanja sebesar *Rp.3.187.876.978,00* atau 68,99%.

Tabel 5.14 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

Aparatur-Administrasi Umum

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Modal Alat Bantu	495.000.000,00	410.000.000,00	82,83	
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	814.171.861	504.486.237,00	61,96	329.502.135,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab				
5	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.038.783.827,00	674.525.998,00	64,93	744.889.577,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio				34.540.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	28.379.504,00			
8	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.224.828.899,00	1.598.864.743,00	71,86	896.648.388,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga				
11	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboraturium	19.573.554,00		0,00	2.902.540,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan				
Jumlah		**4.620.737.645,00**	**3.187.876.978,00**	**68,99**	**2.008.482.640,00**

Belanja Modal yang dilaksanakan tahun 2022 oleh dinas, seperti yang tersebut diatas terdapat belanja modal yang dilakukan langsung oleh BLUD Puskesmas dengan menggunakan dana yang dikelola oleh BLUD Puskesmas senilai Rp. 1.198.897.743,00. Jumlah Rekap Belanja Modal diatas sudah termasuk Belanja modal yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas.

Berikut Belanja Modal BLUD Puskesmas yang langsung dilakukan oleh Puskesmas senilai Rp. 1.248.459.920,00, Yaitu:

1. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.504.486.237,00
2. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 164.032.508,00
3. Belanja Modal Komputer Rp. 530.378.998,00
4. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.49.562.177,00

2.2) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 tidak terdapat belanja modal. Berikut disajikan tabel rincian belanja modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 5.15

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Modal Jaringan Listrik	12.500.000,00	-	-	-
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Air Baku			-	
Jumlah		**12.500.000,00**	-	-	-

2.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan, pada tahun 2022 terdapat belanja modal yang berasal dari belanja Modal BLUD. Berikut disajikan tabel belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 dan tahun 2021,

Tabel 5.16

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja modal Bangunan Gedung	83.450.000,00	49.562.177,00	59,39	-
Jumlah		**83.450.000,00**	**49.562.177,00**	**59,39**	-

2.4) Belanja Modal Aset tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya , pada tahun 2022 tidak terdapat belanja modal, Berikut disajikan tabel Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022

Tabel 5.16

Rincian Realisasi Belanja Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**-**

5.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembiayaan dari Dinas kesehatan berasal dari saldo SILPA di BLUD Puskesmas tahun 2021 senilai Rp. 1.797.688.692,95,00

5.1.4. SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan.

Dari realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.13.987.954.987,51 dan Belanja sebesar Rp. 316.965.230.938,00 sehingga dihasilkan defisit sebesar (Rp.302.977.275.950,49) Dibandingkan dengan tahun 2021 yang juga mengalami defisit sebesar (Rp.299.797.529.045,04) sehingga pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

Tabel 5.17

Rincian Surplus/Defisit Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Surplus/Defisit	(323.419.559.669,00)	(302.977.275.950,49)		(299.797.529.045,04)
Jumlah		**(323.419.559.669,00)**	**(302.977.275.950,49)**		**(299.797.529.045,04)**

5.1.5. PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan saldo kas Puskesmas BLUD Tahun lalu sebesar Rp. 1.797.688.692,95 antara lain:

- Puskesmas BLUD Petang I Rp. 38.573.266,93
- Puskesmas BLUD Petang II Rp. 59.349.037,64
- Puskesmas BLUD Abiansemal I Rp. 9.848.332,79
- Puskesmas BLUD Abiansemal II Rp. 303.675.915,44
- Puskesmas BLUD Abiansemal III Rp. 753.757,83
- Puskesmas BLUD Abiansemal IV Rp. 742.238.566,33
- Puskesmas BLUD Mengwi I Rp. 79.890.262,00
- Puskesmas BLUD Mengwi II Rp. 112.198.344,01
- Puskesmas BLUD Mengwi III Rp. 101.895.188,11
- Puskesmas BLUD Kuta Utara Rp. 98.411.851,14
- Puskesmas BLUD Kuta I Rp. 77.938.431,54
- Puskesmas BLUD Kuta II Rp. 32.790.364,51
- Puskesmas BLUD Kuta Selatan Rp. 140.125.374,68

5.1.6. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. (301.179.587.257,54**)

Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan mendapat tambahan belanja dari BPKAD berupa tambahan belanja LS-BTT dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 . Adapun belanja tersebut merupakan belanja langsung (LS) dimana SP2D LS atas nama BPKAD, SP2D LS-BTT terdiri dari 1 RKA yaitu :

1. RKA I
   Berikut disajikan Rekapan Rincian Belanja BTT Covid-19 Tahun 2021 RKA I

REKAPAN RINCIAN BELANJA BTT COVID-19
RKA I (LS I, LS II, LS III, LS IV)
TAHUN 2022

No	URAIAN	PAGU
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	282.043.710,00
2	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	1.197.011.330,00
3	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	929.182.500,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.304.717,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.720.000,00
6	Belanja Tagihan Listrik	51.347.490,00
7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.482.500,00
8	Belanja Sewa Hotel	1.377.000.000,00
9	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	212.894.000,00
10	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.237.100,00
11	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	765.357.275,00
12	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	147.800.000,00
13	Belanja Tagihan Telepon	10.500.000,00
	JUMLAH	**5.343.880.622,00**
	BELANJA MODAL	
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	83.087.385,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	159.930.075,00
	JUMLAH	**243.017.460,00**
	JUMLAH TOTAL	**5.586.898.082,00**

- Pada RKA I terdapat 6 buah SP2D dengan total jumlah Rp. 5.628.484.765,00 dengan total belanja Rp. 5.586.898.082,00 dan pengembalian (STS) Rp. 41.586.683,00 adapun rinciannya sebagai berikut:
  1. SP2D LS-BTT No.004858/VII/BPKAD/2022 (SP2D LS- BTT RKA I LS I) senilai Rp. 2.686.173.484,00 SP2D tersebut dikeluarkan utk membayar :
     a. Belanja ATK senilai Rp. 42.058.455,00.
     b. Belanja Bahan Penunjang Medis senilai Rp. 518.009.471,00.
     c. Belanja Makanan dan Minuman Rp.161.290.000,00
     d. Belanja Habis Pakai Rp.33.000.000,00
     e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Rp.83.087.385,00
     f. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp. 165.000.000,00
     g. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 90.000,00
     h. Belanja Penambahan Daya Listrik di IFK Rp.51.347.490,00
     i. Belanja Sewa Hotel untuk Isoter Rp. 1.377.000.000,00
     j. Vitamin Rp. 212.894.000,00

     Dari SP2D senilai Rp. 2.686.173.484,00 digunakan untuk pembayaran senilai Rp. 2.644.586.801,00 terdapat kelebihan SP2D sebesar Rp. 41.586.683,00 dan sudah disetor ke kasda dengan menggunakan STS No. 024/STS/Diskes/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

2. SP2D LS-BTT No.06048/VIII/BPKAD/2022 (SP2D LS- BTT RKA I LS II) senilai Rp. 563.753.925,00
   SP2D tersebut dikeluarkan utk membayar :
   a. Belanja ATK senilai Rp. 177.297.525,00
   b. Belanja Bahan Penunjang Medis senilai Rp. 98.751.400,00
   c. Belanja Makanan dan Minuman Petugas Rp. 266.505.000,00
   d. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 1.200.000,00
   e. Belanja Pertamax Rp.20.000.000,00

   Dari SP2D senilai Rp. 563.753.925,00 digunakan untuk pembayaran senilai Rp. 563.753.925,00 tidak terdapat kelebihan pembayaran.

3. SP2D LS-BTT No. 07103/IX/BPKAD/2022 (SP2D LS- BTT RKA I LS III) senilai Rp. 624.358.908,00
   SP2D tersebut dikeluarkan utk membayar :
   a. Belanja Bahan Penunjang Medis senilai Rp. 225.886.408,00
   b. Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Pasien senilai Rp. 264.852.500,00
   c. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 300.000,00
   d. Belanja Transport local Rp. 133.320.000,00

   Dari SP2D senilai Rp. 624.358.908,00 digunakan untuk pembayaran senilai Rp. 624.358.908,00 tidak terdapat kelebihan SP2D .

4. SP2D LS-BTT No. 09753/XI/BPKAD/2022 (SP2D LS- BTT RKA I LS IV) senilai Rp. 268.435.943,00
   SP2D tersebut dikeluarkan utk membayar :
   a. Belanja Alat Tulis Kantor senilai Rp. 38.208.000,00
   b. Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Pasien senilai Rp. 142.187.500,00
   c. Belanja Jasa Kebersihan senilai Rp.14.732.220,00
   d. Belanja Transport local Rp.29.040.000,00
   e. Belanja Sewa Tenda, Kursi dan Meja Rp.17.482.500,00
   f. Insentif Nakes (Pembayaran Hutang 2021) senilai Rp.26.785.723,00

   Dari SP2D senilai Rp. 268.435.943,00 digunakan untuk pembayaran senilai Rp. 268.435.943,00 tidak terdapat kelebihan SP2D

5. SP2D LS-BTT No. SP2D 11642/XII/BPKAD/2022 (SP2D LS- BTT RKA I LS V) senilai Rp. 292.540.346,00
   SP2D tersebut dikeluarkan utk membayar :
   g. Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Pasien senilai Rp. 45.947.500,00
   h. Belanja Jasa Kebersihan senilai Rp. 15.961.401,00
   i. Belanja Transport Lokal senilai Rp.13.680.000,00
   j. Belanja Pertamax Rp.1.237.100,00
   k. Belanja Insentif Nakes Tahun 2022 senilai Rp.215.714.345,00

   Dari SP2D senilai Rp. 268.435.943,00 digunakan untuk pembayaran senilai Rp. 268.435.943,00 tidak terdapat kelebihan SP2D

6. SP2D LS-BTT No. 12458/XII/BPKAD/2022 (SP2D LS- BTT RKA I LS VI) senilai Rp. 1.193.222.159,00
   SP2D tersebut dikeluarkan utk membayar :
   l. Belanja Alat Tulis Kantor senilai Rp. 24.479.730,00
   m. Belanja Bahan Penunjang Medis senilai Rp. 349.294.126,00
   n. Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas senilai Rp.48.400.000,00
   o. Belanja Jasa Kebersihan Rp.15.211.096,00

p. Belanja Transport Lokal Rp.74.680.000,00
q. Insentif Nakes Tahun 2022 senilai Rp.522.857.207,00
r. Honor Tenaga Tracer dan Pengolah Data senilai Rp.147.800.000,00
s. Belanja Komunikasi senilai Rp.10.500.000,00

Dari SP2D senilai Rp. 1.193.222.159,00 digunakan untuk pembayaran senilai Rp. 1.193.222.159,00 tidak terdapat kelebihan SP2D

Dari Belanja Modal LS- BTT Tahun 2022 senilai Rp. 248.087.385,00 terdapat Nilai Extracompatible senilai Rp. 5.069.925

Laporan Operasional (LO)

1. **Pendapatan – LO**

Pendapatan- LO Tahun 2022 senilai Rp.13.983.388.687,51 dan Tahun 2021 senilai Rp. 12.691.253.358,96 yang terdiri dari :

Tabel 5.18

Rincian Pendapatan -LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	13.983.388.687,51	12.675.153.358,96	1.308.235.328,55	9,36
2	Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00.	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	0,00	16.100.000,00	-16.100.000,00,	0,00
Jumlah		**13.983.388.687,51**	**12.691.253.358,96**	**1.292.135.328,55**	**9,24**

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO pada Tahun 2022 senilai Rp. 13.983.388.687,51 dan Tahun 2021 senilai Rp. 12.675.153.358,96 yang terdiri dari :

Tabel 5.20

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Retribusi Daerah -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lain- Lain PAD Yang Sah-LO	13.983.388.687,51	12.675.153.358,96	1.308.235.32,55	9,36
Jumlah		**13.983.388.687,51**	**12.675.153.358,96**	**1.308235.328,55**	**10,36**

1.1.a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi daerah – LO Tahun 2022 senilai Rp 0,00 dan Tahun 2021 senilai Rp. 0,00 .

Antara LRA dan LO pada tahun 2022 tidak terdapat selisih.

Tabel 5.20

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Retribusi Daerah -LO	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

1.1.b. Lain –lain PAD Yang Sah LO.

Lain-lain PAD Yang Sah LO senilai Rp. 13.983.388.687,51 merupakan Pendapatan yang berasal dari :

- Jasa giro pada Kas di Bendahara–LO senilai Rp. 14.437.452,91
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan- LO Rp. 34.395.788,00
- Pendapatan dari BLUD-LO Rp.13.934.545.446,00

- Antara LRA dan LO terdapat selisih Rp.4.566.300,00

  Yang berasal dari selisih Pendapatan BLUD senilai Rp.13.939.111.746,60 dengan **Koreksi atas pengurangan Lain-lain PAD yang sah dan penambahan beban pegawai pada Pusk. Abiansemal I senilai Rp4.566.300,00**

Tabel 5.21

Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Penerimaan Jasa Giro-LO	14.437.452,91	17.507.595,63	(3.070.142,72)	(17,54)
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO				
3	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO				
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO				
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan tunjangan - LO	34.395.788,00		34.395.788,00	
6	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya - LRA		36.148.450,26	(36.148.450,26)	

7	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO				
8	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	13.934.545.446,60	12.621.497.313,07	1.313.048.133,53	9,42
9	Penerimaan Lainnya - LO				
10	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN-LO				
Jumlah		**13.983.388.687,51**	**12.675.153.358,96**	**1.308.235.328,55**	**9,36**

1.2. Lain Lain Pendapatan Yang sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Berasal dari Pendapatan Hibah, Tahun 2022 Dinas kesehatan tidak mendapatakan hibah sedangkan tahun 2021 pendapatan hibah senilai Rp. 18.100.000,00

2. Beban

Beban Tahun 2022 senilai Rp. 345.028.789.956,20 sedangkan Tahun 2021 senilai Rp. 354.666.205.581,73 terdiri dari :

Tabel 5.22
Rincian Beban-LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	117.721.406.602,05	111.510.043.274,00	6.211.363.328,05,00	5,57
2	Beban Barang dan Jasa	198.628.950.425,53	211.109.175.053,83	(12.480.224.628,30)	(5,91)
3	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	25.275.224.898,62	30.177.151.902,42	(4.901.927.003,80)	(16,24)
6	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.209.887.480,00	1.852.178.801,48	1.357.70.678,52	73,30
7	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.656.550,00	17.656.550,00	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.511.140,00	0,00	5.511.140,00	0,00
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.716.345,00	0,00	9.716.345,00	0,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	160.436.515,00	0,00	160.436.515,00	0,00
Jumlah		**345.028.789.956,20**	**354.666.205.581,73**	**(9.637.415.625,53)**	**(2,72)**

1.1. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai - LO Tahun 2022 senilai Rp.117.721.406.602,05 dan Tahun 2021 senilai

Rp. 111.510.043.274,00

Tabel 5.23
Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	50.231.564.630,05	49.792.047.207,00	439.517.423,05	0,88
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	62.845.764.736,00	52.139.562.182,00	10.706.202.554,00	20,53
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.644.077.236,00	9.578.433.885,00	(4.934.356.649,00)	(51.52)
4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -LO	0,00			
5	Honorarium	0,00			
6	Beban Perawatan dan Pengobatan - LO	0,00			
7	Beban Honorarium PNS	0,00			
8	Beban Honorarium Non PNS	0,00			
Jumlah		**117.721.406.602,05**	**111.510.043.274,00**	**6.211.363.328,05**	**5,57**

Beban Pegawai- LO tahun 2022 senilai Rp. 117.721.406.602,05 terdiri dari

- Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 50.231,564.630,05
- Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp.62.845.764.736,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp. 4.644.077.236,00.

Antara LRA dan LO Terdapat Selisih Yaitu :

LRA Senilai Rp.112.113.258.373,00 dan LO Senili Rp.117.434.842.271,00 terdapat selisih sebesar Rp.5.608.148.229,05 berupa :

- Penambahan berupa reklas belanja barang dan jasa BLUD ke beban pegawai serta adanya Koreksi senilai Rp.5.635.077,00 berupa :
  1. Reklas belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pegawai Rp.4.668.266.757,00
  2. Koreksi tambah beban pegawai Puskesmas Petang I senilai Rp145.178.188,00
  3. Koreksi penambahan beban pegawai pada Pusk. Abiansemal II senilai Rp143.531.784,40.
  4. Koreksi tambah beban pegawai pada Puskesmas Petang II sebesar Rp.0,05
  5. Koreksi tambah pada Beban Pegawai Puskesmas Kuta II senilai Rp.179.974,00
  6. Koreksi tambah beban pegawai Puskesmas Kuta II senilai Rp. 212.977.628,00
  7. koreksi tambah beban pegawai Puskesmas Kuta I Rp464.529.034
- Pengurangan berupa pembayaran hutang belanja pegawai Tahun 2021 dan koreksi senilai Rp.26.929.301,00 berupa:
  1. Insentif Nakes ASN bln Desember 2021 Rp.21.785.721,00
  2. Hutang Jaspel BLUD Puskesmas Petang I Rp. 2.223.826,00
  3. Hutang Jaspel BLUD Puskesmas Kuta II Rp. 179.974,00
  4. Koreksi atas pengurangan Lain-lain PAD yang sah dan penambahan beban

pegawai pada Pusk. Abiansemal I senilai Rp.2.739.780,00

1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Jasa Tahun 2022 senilai Rp.198.628.950.425,53 dan Tahun 2021 senilai Rp. 211.109.175.053,83

Tabel 5.24
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	19.917.403.029,58	26.428.798.755,83	(15.207.335.055,26)	(57,54)
	Beban Barang Tak Habis Pakai	4.277.180,00		4.277.180,00	
2	Beban Persediaan Bahan/ Material				
3	Beban Jasa Kantor	61.819.473.238,95	67.363.238.758,00	(4.740.329.574,00)	(7,04)
4	Beban Premi Asuransi	106.969.710.119,00	103.873.076.134,00	4.107.706.977,00	3.95
5	Beban perawatan Kendaraan Bermotor				
6	Beban Cetak dan Penggandaan				
7	Beban Sewa Rumah /Gedung/ Gudang/Parkir	93.400.000,00	7.956.612.500,00	(7.863.212.500,00)	(98,83)
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas				
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
10	Beban Makanan dan Minuman				
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya				
12	Beban Pakaian Kerja				
13	Beban Pakaian Khusus dan hari hari tertentu				
14	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.483.042.522,00	910.594.362,00	547.067.529,00	60,08
15	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	562.299.819,00	178.791.294,00	396.255.487,00	221,63
	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.263.180,00		4.473.180,00	
16	Beban Perjalanan Dinas	5.231.597.400,00	3.691.386.200,00	1.565.924.200,00	42,42
17	Beban Pemeliharaan				
18	Beban Jasa Konsultasi	17.557.980,00		17.557.980,00	
19	Beban Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	64.819.500,00		73.569.500,00	
20	Beban Honorarium Non Pegawai				
21	Beban Honorarium PNS-LO				
22	Beban Honorarium Non PNS-LO				
23	Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	811.837.628,00	706.677.050,00	103.053.976,00	14,58
24	Beban yang berseumber dari Dana Kapitasi JKN				
25	Beban Jasa Pemilahan dan Pengolahan Sampah				
26	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.652.268.829,00		48.694.711,00	
Jumlah		**198.628.950.425,53**	**211.109.175.053,83**	**(20.942.296.409,26)**	**(9,92)**

Beban Barang dan Jasa LO Tahun 2022 senilai Rp. 198.628.950.425,53 terdiri dari:

1. Beban Barang Pakai Habis Rp. 19.917.403.029,58
2. Beban Barang Tak Habis Pakai Rp. 4.277.180,00
3. Beban Jasa Kantor Rp. 61.819.473.238,95
4. Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp.106.969.710.119,00
5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan Rp.93.400.000,00
6. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi Rp.17.557.980,00
7. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.64.819.500,00
8. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.483.042.522,00
9. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 562.299.819,00
10. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.1.263.180,00
11. Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.5.231.597.400,00
12. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.811.837.628,00
13. Beban Barang dan jasa BLUD Rp.1.652.268.829,00

2.3 Beban Hibah

Beban hibah Tahun 2022 senilai Rp.0,00 dan Tahun 2021 senilai Rp.0,00

Tabel 5.25
Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beban hibah Tahun 2022 tidak terdapat beban hibah sedangkan tahun 2021 juga tidak terdapat terdapat beban hibah. Antara LRA dan LO tidak terdapat selisih.

2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 senilai Rp. 28.678432.928,62 dan Tahun 2021 senilai Rp. 32.046.987.253,90

Tabel 5.26
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.275.224.898,62	30.177.151.902,42	(4.901.0927.003,80)	(16,24)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.209.887.480,00	1.852.178.801,48	1357.708.678,52	73,30

3	Beban Penyusutan Jalan.Irigasi dan Jaringan	17.656.550,00	17.656.550,00	0,00	0,00
	Beban Aset Tetap Lainnya	5.511.140,00		5.511.140,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.716.345,00	0,00	9.716.345,00	0,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	160.436.515,00	0,00	160.436.515,00	0,00
Jumlah		**28.678.432.928,62**	**32.046.987.253,90**	**(3.368.554.325,28)**	**(10,51)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 senilai Rp. 28.678.432.928,62 terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 25.275.887.480,00 , beban penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp. 3.209.887.480,00 beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringannya senilai Rp. 17.656.550,00 , beban penyusutan Aset tetap Lainnya Rp. 5.511.140,00, Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp.9.716.345,00 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 160.436.515,00

3. Surplus /Defisit Operasi

Surplus /Defisit Operasi senilai Tahun 2022 Rp. (331.045.401.268,69) dan Tahun 2021 senilai Rp. (341.974.952.222,77)

4. Kegiatan Non Operasional

4.1 Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset non Lancar-LO

Defisit Penjualan/ pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO ini merupakan Nilai Buku Yang Masih ada di Asset yang dihapuskan dan persediaan dari bahan obat-obatan di Gudang Farmasi yang kadaluarsa /ED *(Expired Date)* pada tahun 2022 senilai Rp.4.618.815.174,89. Yaitu :

a. Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO Senilai Rp.1.409.926.430,00
b. Defisit Penjualan Alat Angkutan –LO Senilai Rp. 12.836.111,00
c. Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO Senilai Rp. (9.120.355,00)
d. Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO Senilai Rp. (11.595.690,00)
e. Defisit Penjualan Komputer-LO Snilai Rp. 13.516.074,00
f. Defisit penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO Rp. 17.998.750,00
g. Defisit Penjualan Tanah-LO (Bahan Obat-Obatan ED *(Expired Date))* di Intsalasi

Farmasi Rp. 3.190.764.994,89

h. Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO Rp.(5.511.140,00)

5. Surplus /Defisit LO

Surplus Defisit LO tahun 2022 Rp. (335.664.216.443,58) dan Tahun 2021 Rp. (345.589.074.444,77)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kesehatan Tahun 2022 senilai Rp.230.504.613.289,92 dan Tahun 2021 senilai Rp. 221.757.751.589,98

Tabel 5.27
Ekuitas Awal LPE Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022	SALDO 2021
		Rp	Rp
1	Ekuitas Awal	230.504.613.289,92	221.757.751.589,98
Jumlah		**230.504.613.289,92**	**221.757.751.589,98**

2. Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit LO Tahun 2022 senilai Rp. (335.664.216.443,58) dan Tahun 2021 senilai Rp. (345.589.074.444,77) yang didapat dari Laporan Operasional (LO).

Tabel 5.27

Surplus Defisit LPE Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022	SALDO 2021
		Rp	Rp
1	Surplus /Defisit LO	(335.664.216.443,58)	(345.589.074.444,77)
Jumlah		**(335.664.216.443,58)**	**(345.589.074.444,77)**

Saldo surplus defisit dari LPE didapat dari Saldo surplus/defisit di LO

***3.* DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

Tabel 5.28

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan LPE Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp
	Koreksi Ekuitas	6.345.303.467,57	54.993.311.986,60
Jumlah		**6.345.303.467,57**	**54.993.311.986,60**

Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada tahun 2022 senilai Rp. 6.345.303.467,57

Yang merupakan Penyesuaian Aset dan saldo awal penyusutan asset.

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan tahun 2022 senilai Rp. 302.817.538.296,09 dan tahun 2021 senilai Rp. 299.361.991.578,11 merupakan rekening RK/PPKD baik Pendapatan dan Belanja

Tabel 5.29

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp
1	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	302.817.538.296,09	299.361.991.578,11
Jumlah		**302.817.538.296,09**	**299.361.991.578,11**

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir senilai Tahun 2022 senilai Rp. 204.003.238.610,00 dan Tahun 2021 senilai Rp. 230.504.613.289,92 merupakan hasil penjumlahan dari ekuitas awal, surplus/Defisit, koreksi ekuitas dan kewajiban untuk dikonsolidasikan.
Ekuitas Akhir merupakan ekuitas dari suatu entitas/ lembaga.

Tabel 5.30
Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 Rp	SALDO 2021 Rp
1	Ekuitas Akhir	204.003.238.610,00	230.504.613.289,92
Jumlah		**204.003.238.610,00**	**230.504.613.289,92**

NERACA

	TAHUN 2022	TAHUN 2021
I. ASET	**Rp. 204.187.437.421,00**	**Rp. 231.464.948.117,92**

1) ASET LANCAR **Rp. 14.373.623.676,91** **Rp. 12.612.620.494,47**

1.1. Kas di Bend.Penerimaan **Rp 0,00** **Rp. 0,00**

Tahun 2022 tidak terdapat saldo Kas dari Bendahara Penerimaan Dinas per tanggal 31 Desember 2021

1.2 Kas di Bend. Pengeluaran **Rp 0,00** **Rp. 0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 :

	Bank BPD No.Rek .009.01.05.00082-4	Rp	0,00
	Uang Tunai	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	**0,00**

Pada Tahun 2022 tidak terdapat saldo kas di bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021

1.3 Kas di BLUD

Rp. 1.394.933.578,55 **Rp. 1.800.989.605,95**

Jumlah tersebut merupakan penambahan dari saldo kas di BLUD Puskesmas yang merupakan saldo kas di BLUD tahun 2021 senilai Rp. 1.797.688.692,95 ditambah dengan pendapatan di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun 2022 yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan, Pendapatan Kapitasi JKN, Pendapatan Non Kapitasi JKN dan Jasa giro Tahun 2022 senilai Rp.13.939.111.746,60 dikurangi dengan belanja yang dilakukan oleh puskesmas BLUD senilai Rp. 14.342.340.661,00 (SP2B) . dengan Saldo Rp. 1.394.459.778,55 di tambah dengan Pengembalian Kelebihan Belanja Modal Puskesmas Abiansemal IV senilai Rp.473.800,00

Sehingga saldo kas di BLUD menjadi Rp. 1.394.933.578,55

REKAP SALDO KAS BENDAHARA PUSKESMAS BLUD (SP2B)

No	Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan tahun 2022	Belanja (SP2B)	Saldo
1	Petang I	38.573.266,93	711.936.136,59	747.557.684,00	2.951.719,52
2	Petang II	59.349.037,64	676.949.275,72	595.507.507,00	140.790.806,36
3	Abiansemal I	9.848.332,79	1.443.835.810,79	1.424.204.226,00	29.479.917,58
4	Abiansemal II	303.675.915,44	704.803.682,31	901.834.244,00	106.645.353,75
5	Abiansemal III	753.757,83	859.004.498,74	833.353.752,00	26.404.504,57
6	Abiansemal IV	742.238.566,33	724.570.339,71	949.380.089,00	517.428.817,04
7	Mengwi I	79.890.262,00	2.087.704.046,29	2.115.316.134,00	52.278.174,29
8	Mengwi II	112.198.344,01	1.091.694.526,97	1.181.724.770,00	22.168.100,98
9	Mengwi III	101.895.188,11	904.600.142,38	975.279.379,00	31.215.951,49
10	Kuta Utara	98.411.851,14	1.367.022.230,60	1.431.229.599,00	34.204.482,74

11	Kuta I	77.938.431.54	1.221.456.946,49	1.273.331.985,00	26.063.393,03
12	Kuta II	32.790364,51	614.216.141,03	523.876.453,00	123.130.052,54
13	Kuta Selatan	140.125.374,68	1.531.317.968,98	1.389.744.839,00	281.698.504,66
	Jumlah	**1.797.688.692,95**	**13.939.111.746,60**	**14.342.340.661,00**	**1.394.459.778,55**

1.4 Kas Lainnya **Rp. 0,00** **Rp. 0,00**

Tahun 2022 tidak terdapat saldo kas lainnya.

1.5 Piutang Pendapatan **Rp. 0,00** **Rp. 0,00**

Piutang Pendapatan pada Tahun 2022 tidak terdapat piutang pendapatan.

1.6. Persediaan **Rp. 12.978.690.098,36** **Rp. 10.811.630.888,52**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

	URAIAN		TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	180.928.962,00	12.344.698,00
-	Persediaan Alat Listrik	Rp	32.542.464,43	
-	Persediaan Barang Cetak	Rp	84.600.990,50	
-	Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	Rp.	224.062.100,00	232.020.300,00
-	Persediaan Obat	Rp	7.679.034.086,62	8.205.038.453,46
-	Persediaan Obat-Obatan Lainnya	Rp	314.910,00	
-	Persediaan dalam Proses	Rp	4.477.800.985,51	
-	Persediaan Benda Pos	Rp	930.000,00	
-	Persediaan Bahan Kimia	Rp	134.473.127,60	28.445.670,00
-	Persediaan Bahan Lainnya	Rp	0,70	2.333.781.767,06
-	Persediaan Perabot Kantor	Rp	75.685.711,00	
-	Persediaan Suku cadang Alat Laboratorium	Rp	88.316.760,00	
	Jumlah	Rp	**12.978.690.098,36**	**10.811.630.888,52**

Pada Tahun 2022 terdapat Persediaan Bahan Obat- Obatan yang kadaluarsa/ED (Expired Date) di Gudang Farmasi senilai Rp. 3.190.764.994,89,00. Jumlah tersebut tidak termasuk di dalam Jumlah Total Persediaan Obat-obatan pada tabel diatas, dimana jumlah persediaan bahan obat- obatan diatas merupakan jumlah persediaan bahan obat-obatan yang masih dalam kondisi baik/tidak kadaluarsa

Berikut disajikan total obat-obatan yang sudah kadaluwarsa/ED (Expired Date) di Gudang Farmasi tahun 2021 :

1	Instalasi Farmasi	Rp. 2.190.592.447,92
4	Obat Pengembalian Puskesmas Januari s/d Desember 2021	Rp. 1.000.172.546,97
	Total	**Rp. 3.190.764.994,89**

2) ASET TETAP

Aset Tetap **Rp. 190.678.130.774,74** **Rp. 216.759.206.735,45**

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

		Tahun 2022	**Tahun 2021**
a) Tanah		**Rp. 18.081.861.470,59**	**Rp. 18.197.485.000,00**

	Mutasi Tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut:			
	Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp	18.197.485.000,00	2.877.250.000,00
	Penambahan Tahun 2022	Rp	0,00	15.320.235.000,00
	Pengurangan Tahun 2022	Rp	115.623.529,41	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	**18.081.861.470,59**	**18.197.485.000,00**

Pengurangan Aset Tanah Tahun 2022 berasal dari penghapusan nilai tanah pustu gerih dengan Berita Acara No.93/054/HK/2022 senilai Rp. 115.623.529,41

b) Peralatan dan Mesin **Rp. 228.973.859.322,42** **Rp. 226.815.823.798,37**

Pengadaan 2022

(1)	Electric Generating Set	Rp.	410.000.000,00
(2)	Alat Kantor Lainnya	Rp.	135.996.799,00
(3)	Mebel	Rp.	151.524.000,00
(4)	Alat Pendingin	Rp.	51.255.470,00
(5)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	158.360.118,00
(6)	Alat Pemadam Kebakaran	Rp.	7.349.850,00
(7)	Alat Kedokteran Umum	Rp.	553.646.083,00
(8)	Alat Kedokteran Gigi	Rp.	21.699.000,00
(9)	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp.	2.775.000,00
(10)	Alat Kedokteran Lainnya	Rp.	10.500.000,00
(11)	Alat Kesehatan Umum Lainnya	Rp.	1.010.244.660,00
(12)	Personal Komputer	Rp.	207.332.000,00
(13)	Komputer Unit Lainnya	Rp.	353.682.999,00
(14)	Peralatan Personal Komputer	Rp.	93.533.999,00
(15)	Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	19.977.000,00
	Jumlah	Rp	**3.187.876.978,00**

Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.228.973.859.322,42 dan Rp. 226.815.823.798,77

Mutasi Aset Peralatan Mesin periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Saldo Awal		2022		2021	
	Peralatan Mesin	**Rp.**	**226.815.823.798,37**	**Rp.**	**214.812.953.978,77**
Penambahan					
	Belanja Modal Th 2022	Rp.	1.988.979.235,00	Rp.	2.008.482.640,00
	Penyesuaian Belanja Modal 2020	Rp.		Rp.	
	Belanja Modal BLUD	Rp.	1.198.897.743,00	Rp.	
	Hibah Kemenkes	Rp.	521.180.000,00	Rp.	
	Belanja Modal –LS BTT Covid-19	Rp.	248.087.385,00	Rp.	463.804.877,73,00
	Non Belanja Modal Dana Tak Terduga				11.916.751,00
	Mutasi Barang dari PUPR & Kominfo	Rp.		Rp.	291.122.000,00
	Mutasi Barang dari PUPR	Rp.		Rp.	10.195.083.133,00
	Jumlah	**Rp.**	**3.957.144.363,00**	**Rp.**	**12.970.409.401,73,00**
Pengurangan					
	Mutasi Belanja LS-BTT ke OPD Lain	Rp.	398.294.600,00	Rp.	
	Mutasi Belanja dari BTT ke RSD Mangusada				168.599.028,73
	Kapitalisasi aset tetap BM 202149.137.00	Rp.		Rp.	49.137.000,00
	Barang extrakompatible BM 2022	Rp.	2.360.000,00	Rp.	116.808.042,00
	Nilai Ekstrakompatible dari BM BLUD	Rp.	27.324.892,00	Rp.	
	Nilai Extracomp.BM LS BTT	Rp.	5.069.925,00	Rp.	73.768.000,00
	Hibah ke Polres Badung	Rp.			6.600.000,00
	Belanja Modal BLUD Non Aset Tetap	Rp.	549.450,00		
	Penyesuaian Belanja Modal/Bukan aset tetap	Rp.			1.693.461,00
	Reklas ke Aset lainnya/Usulan penghapusan	Rp.	1.365.509.971,95		177.809.500,00
	Penyesuaian Mutasi dari OPD pindah ke KIB C				77.290.150,00
	Extracomp. Mutasi dari PUPR				295.834.400,00
	Jumlah	**Rp.**	**1.799.108.838,95**	**Rp.**	**967.539.581,73**
	Jumlah Total	**Rp.**	**228.973.859.322,42**	**Rp.**	**226.815.823.798,37**

- Penambahan Peralatan Mesin untuk 31 Desember tahun 2022 senilai Rp.3.957.144.363,00 berasal dari :

  a. Belanja Modal tahun 2022 Dinas Rp. 1.988.979.235,00
  b. Belanja Modal Puskesmas BLUD tahun 2022 Rp. 1.198.897.743,00
  c. Hibah dari Kemenkes tahun 2022 Rp.521.180.000,00
  d. Belanja Modal Dana Tak Terduga LS-BTT Rp.248.087.385,00

- Pengurangan Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 1.799.108.838,95 berasal dari:
  a. Mutasi Belanja Modal LS-BTT ke OPD Lain Rp. 398.294.600,00
  b. Barang Extracompatible Belanja Modal 2022 Rp. 2.360.000,00
  c. Nilai Extracompatible dari Belanja Modal BLUD 2022 Rp. 27.324.892,00
  d. Nilai Extracompatible Belanja Mdal LS BTT 2022 Rp.5.069.925,00
  e. Belanja Modal Non Aset Tetap BLUD Rp.549.450,00
  f. Reklas ke Aset Lainnya/ Usulan Penghapusan Rp. 1.365.509.971,95

c) Bangunan Gedung Rp. 155.034.861.429,03 Rp. 154.985.299.252,03

Mutasi Asset Bangunan Gedung periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Saldo Awal		**2022**		**2021**	
	Bangunan Gedung	**Rp.**	**154.985.299.252,03**	**Rp.**	**125.447.453.624,35**
Penambahan					
	Belanja Modal	Rp.		Rp.	
	Belanja Modal BLUD (SP2B) 2022	Rp.	49.562.177,00	Rp.	
	Mutasi dari PUPR	Rp.			29.663.590.811,01
	Penyesuaian dari kib B	Rp.		Rp.	77.290.150,00
	Belanja Modal BTT Covid-19	Rp.			
	Jumlah	**Rp.**	**49.562.177,00**	**Rp.**	**29.740.880.961,01**
Pengurangan					
	Penyesuaian brg extracompatible	Rp.		Rp.	14.000.000,00
	Koreksi atas Temuan BPK Audit Kinerja th 2020 pada dinas PUPR yg sudah mutasi ke diskes	Rp.		Rp.	16.571.333,33
	Reklas ke Aset Lainnya Usulan Penghapusan	Rp.			172.464.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**203.035.333,33**
	Jumlah Total	**Rp.**	**155.034.861.429,03**	**Rp.**	**154.985.299.252,03**

- Penambahan Bangunan Gedung 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp.49.562.177 berasal dari:
  a. Belanja Modal BLUD (SP2B) Rp. 49.562.177,00.
- Pengurangan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 senilai Rp.0,00

d). Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 513.960.184,18 Rp. 513.960.184,18

Mutasi Asset Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Saldo Awal		**2022**		**2021**	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp.**	**513.960.184,18**	**Rp.**	**513.960.184,18**
Penambahan					
	Belanja Modal	Rp.		Rp.	
	Non Belanja Modal (Pengawasan)	Rp.		Rp.	
	Mutasi Antar OPD (Taman dan Tower)	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	Mutasi dari PUPR	Rp.		Rp.	
	Lain-lain (Kurang Catat)	Rp.		Rp.	
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
Pengurangan					
	Penghapusan	Rp.		Rp.	
	Mutasi antar OPD (Taman pindah ke kib C	Rp.		Rp.	
	Mutasi KIB (pindah ke kib C)	Rp.		Rp.	
	Penghapusan RB/Hilang	Rp.		Rp.	
	Kapitalisasi Asset >500.000,-	Rp.		Rp.	
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
	Jumlah Total	**Rp.**	**513.960.184,18**	**Rp.**	**513.960.184,18**

- Penambahan jalan,irigasi dan jaringannya per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00
- Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 Senilai Rp. 0,00

e) Asset Tetap Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00

Mutasi Asset Asset Tetap Lainnya periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Saldo Awal		**2022**		**2021**	
	Asset Tetap Lainnya	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
Penambahan					
	Belanja Modal BLUD Tahun 2020	Rp.		Rp.	
	Belanja BTT Covid-19	Rp.		Rp.	
	Mutasi KIB	Rp.		Rp.	
	Penerimaan Hibah	Rp.		Rp.	
	Lain-lain (Kurang Catat)	Rp.		Rp.	
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
Pengurangan					
	Penghapusan	Rp.		Rp.	
	Reklasifikasi ke aset lain (RB)	Rp.		Rp.	
	Mutasi KIB	Rp.		Rp.	

	Penyesuaian KIB ke KIB C	Rp.		Rp.	
	Penyesuaian belanja modal ke kib C (kanopi)	Rp.		Rp.	
	Reklas Belanja Dana BTT covid-19 ke persediaan	Rp.		Rp.	
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
	Jumlah Total	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**

- Penambahan asset tetap lainnya 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 0,00,-

f). Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 1.026.425.054,07 Rp 1.026.425.054,07

Mutasi Asset Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Saldo Awal		**2022**		**2021**	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	**Rp.**	**1.026.425.054,07**	**Rp.**	**1.026.425.054,07**
Penambahan					
	Belanja Modal	Rp.		Rp.	
	Non Belanja Modal (Pengawasan)	Rp.		Rp.	
	Belanja BTT Covid-19	Rp.		Rp.	
	Mutasi dari OPD PUPR	Rp.		Rp.	
	Lain-lain (DED 2016)	Rp.		Rp.	
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
Pengurangan					
	Penghapusan	Rp.		Rp.	
	DED 2013 masuk ke asset tetap	Rp.		Rp.	
	Mutasi KIB	Rp.		Rp.	
	Mutasi Ke Sekretariat	Rp.		Rp.	
	Lain-lain (Lebih catat)	Rp.		Rp.	
	Koreksi (Penyesuaian)	Rp.		Rp.	
	Penghapusan RB/Hilang	Rp.		Rp.	
	Kapitalisasi DED	Rp.		Rp.	
	Jumlah	**Rp.**	**0,00**	**Rp.**	**0,00**
	Jumlah Total	**Rp.**	**1.026.425.054,07**	**Rp.**	**1.026.425.054,07**

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 senilai Rp. 0,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 senilai Rp. 0,00

g). Akumulasi Penyusutan Rp. (212.952.836.685,55) Rp. (184.779.786.553,20)

Merupakan jumlah total dari akumulasi penyusutan baik berupa Alat dan Mesin, Bagunan Gedung, Jalan rigasi dan Jaringannya dan Aset Tetap Lainnya yaitu :

Jenis Aset	Saldo Awal	Penambaha n	Penyesuaian Saldo Awal	Total Penyusutan
Perlatan dan Mesin	(159.804.467.178,20)	(183.726.228.810,95)	(158.780.722.708,60)	(183.709.891.579,95)
Gedung dan Bangunan	(24.854.882.508,00)	(859.564.226,00)	2.350.323.254,00	(28.064.769.988,00)
Jalan,Irigasi dan Jaringan	(120.436.867,00)	(138.093.417,00)	(120.436.867,00)	(138.093.4417,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00			
Jumlah	**(184.779.786.553,20)**	**(184.723.886.452,95)**	**(156.550.836.321,60)**	**(212.952.836.685,55)**

3. **ASET LAINNYA Rp. (864.317.030,65) Rp. 2.093.120.888,00**

3.1 Asset Tidak Berwujud Lain Rp. 532.888.889,00 Rp. 0,00

Merupakan Aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang tidak berwujud senilai Rp. 532.888.889,00

3.2 Aset Lain-lain Rp. (593.844.144,30) Rp. 2.093.120.888,00

Aset Lain-lain merupakan saldo dari Aset Lain-lain dan Penyusutan Barang Rusak Berat (RB)

3.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. (803.361.775,35) Rp. 0,00

a. KEWAJIBAN Rp. 184.198.811,00 Rp. 960.334.828,00

4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp. 0,00 Rp. 3.300.913,00

Pada Tahun 2022 tidak terdapat utang Perhitungan Pihak Ketiga

4.1.2 Utang Belanja (Beban) Rp. 184.198.811,00 Rp. 957.033.915,00

Merupakan hutang yang harus dibayar pada tahun 2022 baik berupa belanja pegawai ,barang dan jasa. dan Barang dan Jasa BLUD Puskesmas. Hutang Beban tahun 2022 senilai Rp 184.198.811**,**00 yang terdiri dari

1. **Utang Belanja Pegawai Senilai Rp. 0,00**

   Pada Tahun 2022 tidak terdapat utang belanja pegawai.

2. **Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 184.198.811,00**.

   Termasuk diantaranya yaitu**:**

   a. Utang Belanja Barang Rp. 2.160.000,00

   - Utang Belanja Barang Makanan dan Minuman Pasien (Peningkatan Kualitas Layanan) Rp.2.160.000,00

   b. Utang Belanja Jasa Rp. 133.036.600,00

   - Utang Belanja Tagihan Jasa Telepon Dinas Rp.1.737.089,00
   - Utang Belanja Tagihan Jasa Telepon Puskesmas Rp. 7.349.105,00

- Utang Belanja Tagihan Air Puskesmas Rp.11.205.186,00
- Utang Belanja Tagihan Listrik Puskesmas Rp. 112.414.820,00
- Utang Belanja Jasa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 bulan Desember 2022 Rp.137.383.800,00

c. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Rp. 49.002.211,00

- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Abiansemal II (Jaspel) Rp.307.500,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Petang I (4% BPJS Desember 2022) Rp.254.792,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Petang II (4% BPJS Desember 2022) Rp. 143.120,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Petang Abs I (4% BPJS Desember 2022) Rp.459.524,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Petang Abs II (4% BPJS Desember 2022) Rp. 904.119,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Petang Abs III (4% BPJS Desember 2022) Rp. 265.787,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Petang Abs IV (4% BPJS Desember 2022) Rp. 876.487,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Mengwi I (4% BPJS Desember 2022) Rp. 596.210,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Mengwi II (4% BPJS Desember 2022) Rp. 1.318.072,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Mengwi III(4% BPJS Desember 2022) Rp.344.289,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Kuta Utara(4% BPJS Desember 2022) Rp. 1.881.909,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Kuta I (4% BPJS Desember 2022) Rp. 916.191,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Kuta II (4% BPJS Desember 2022) Rp. 158.855,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Kuta II (Jaspel Desember 2022) Rp. 36.450.120,00
- Hutang Belanja barang dan Jasa BLUD Kuta Selatan (4% BPJS Desember 2022) Rp.4.125.236,00

4.1.3 Utang Jangka Pendek Lain Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tahun 2020 tidak terdapat utang jangka pendek lain yaitu senilai Rp. 0,00

5. EKUITAS Rp. 204.003.238.610,00 Rp. 230.504.613.289,92

Jumlah tersebut adalah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang diinvestasikan per tanggal 31 Desember 2022 yang dikelola oleh SKPD, yaitu senilai Rp. 204.003.238.610,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Tahun 2022 Rp. 204.187.437.421,00 dan Tahun 2021 Rp. 231.464.948.117,92